

SEMINAR

**AKTUALISASI
NILAI-NILAI SUMPAH PEMUDA
dan
BHINNEKA TUNGGAL IKA**

DISELENGGARAKAN OLEH *BISMA*

Jakarta, 25 November 2000

BISAKAH KEBERAGAMAN AGAMA MENDUKUNG PERSATUAN BANGSA INDONESIA?

oleh

FRANZ MAGNIS-SUSENO SJ

PENGANTAR

Memandang situasi masyarakat Indonesia, di ambang milenium ketiga, banyak orang merasa cemas. Tingkat kekerasan dalam masyarakat yang selalu sudah cukup tinggi, dalam tahun 1998 mencapai puncak baru. Jumlah, ganasnya dan luasnya segala macam kerusuhan, perampasan, penjarahan dan tindak kriminal lain, serta jumlah kematian akibat kejadian-kejadian itu sungguh-sungguh mengkhawatirkan. Di antara kerusuhan-kerusuhan yang beraneka alasan dan arah itu, termasuk sejumlah kerusuhan dan tindak kekerasan yang jelas-jelas bernada permusuhan antar agama. Jumlah rumah ibadat yang dalam tiga tahun terakhir diserang, dirusak, sebagian dihancurkan dan dibakar mencapai ratusan buah (lebih banyak

dari selama seluruh 50 tahun Kemerdekaan pertama). Yang paling mengerikan dan amat sangat menyedihkan adalah situasi di Maluku Selatan dan terutama di Ambon di mana situasi hanya dapat dideskripsikan sebagai perang antara umat beragama, umat-umat Muslim di satu pihak dan umat-umat Kristen di lain pihak. Belum pernah sesuatu seperti itu terjadi dalam sejarah Indonesia Merdeka. Bagaimana hal itu sampai terjadi dan apa yang dapat kita lakukan?

Yang kiranya jelas: Tak ada alasan untuk secara dangkal menyangkal seakan-akan "sebenarnya tidak ada masalah" di antara agama-agama. Namun mengakui adanya masalah tidak berarti bahwa kita harus mencari dasarnya secara dangkal juga. Adalah suatu kenyataan bahwa kerinduan akan hidup berdampingan agama-agama di Indonesia secara damai ada dalam hati banyak orang. Bukan hanya para tokoh agama yang -kadang-kadang secara ritual- menegaskan kembali bahwa agama sebenarnya mengajarkan toleransi dan perdamaian dan tidak membenarkan kebencian dan tindak kekerasan terhadap umat beragama serta gedung-gedung ibadatnya. Melainkan di kebanyakan desa dan kampung-kampung masyarakat sendiri yang terdiri atas suku, ras dan agama yang berbeda hidup bersama dengan baik. Yang menjadi masalah ialah bahwa suasana baik itu rawan terhadap hasutan dan re-

kayasa. Dan segala pertimbangan bagus-bagus ini tidak mengubah kenyataan yang begitu menyedihkan.

Makalah ini dimaksud sebagai sumbangan sederhana untuk ikut memikirkan bagaimana kita dapat ke luar dari keme-lut ini. Kita tidak boleh menyerah terhadap semacam dinami-ka perusak. Kita masih dan hidup bersama dengan baik. Kita jangan membiarkan bangsa Indonesia hancur dari dalam.

Dalam makalah ini saya akan (1) mengajukan beberapa pertimbangan normatif yang menunjukkan bahwa seharusnya para umat beragama mesti dapat hidup dengan baik dan rukun dalam kesatuan satu negara, dalam satu masyarakat. Dalam bagian (2) saya menunjuk pada kenyataan bahwa hubungan Kristen - Islam memang sejak lama ada kerawanannya. Namun, dan itu bagian (3), pada hakekatnya situasi konflik sekarang tidak dapat dimengerti dari kekhasan masing-masing agama maupun umat beragama, melainkan harus dipahami sebagai konflik komunalistik. Di bagian (4) saya menawarkan beberapa pertimbangan bagaimana konflik komunalistik itu barang kali dapat diatasi. (5) Kemudian saya mau menegaskan bahwa umat-umat beragama sendiri, dan terutama pada tokoh, pimpinan dan panutan juga memikul bagian tanggungjawab atas situasi itu. Akhirnya (6) saya berani mengajukan himbauan kepada saudara-saudara seiman saya, umat

Kristen Indonesia (di mana kata "Kristen" saya pakai dalam arti memuat baik Kristen Protestan maupun Katolik).

1. BEBERAPA PERTIMBANGAN NORMATIF

Sebagai titik tolak saya di sini sekadar merangkum apa yang menurut ajaran resmi Gereja Katolik seharusnya menjadi sikap umat Katolik terhadap agama-agama lain. Menurut ajaran ini dialog dengan saudara-saudara dari agama-agama lain merupakan bagian integral penghayatan ajaran Injil sendiri. Injil sendiri mengajak orang kristiani untuk berdialog, untuk belajar dari pengalaman umat beragama lain, untuk menghormati dan mencintai mereka, serta untuk bersama dengan mereka membangun kehidupan masyarakat yang baik, adil, damai dan sejahtera. Dengan lain kata: To be religious today is to be inter-religious. Pada hakekatnya sikap ini ditegaskan dengan ser resmi-resminya oleh Konsili Vatikan II.¹

Pertimbangan di atas pada hakekatnya bersifat normatif, artinya bagaimana seharusnya sikap umat Katolik terhadap agama-agama lain. Begitu pula, tanpa penelitian apa pun, dapat disebutkan bahwa agama-agama besar lain di Indonesia, umat-umat Kristen Protestan, umat Islam, umat Hindu, umat

¹ Saya menguraikan posisi resmi Gereja Katolik dengan lebih panjang lebar dalam karangan saya "Satu Allah Banyak Agama" dlm: Rohani 60/8 (1999), 325-332.

Buddha, umat Khonghucu dan lain-lain mengajarkan sikap baik dan positif terhadap umat beragama lain serta terhadap kehidupan religiusnya dan menyetujui perlunya dialog antara umat-umat beragama. Yang menjadi masalah, dan yang memang membingungkan kita semua adalah bagaimana menjelaskan kenyataan bahwa hubungan di antara umat-umat beragama di Indonesia begitu rawan. Baru kalau kita memahami kenyataan mengejutkan ini secara memadai kita dapat merancang jalan ke luar daripadanya.

2. SEJARAH YANG MEMBEBANI

Sebaiknya kita bertolak dari sebuah kenyataan: Hubungan umat Kristen dengan umat Islam dibebani oleh sebuah sejarah yang untuk sebagian besar tidak ditandai oleh saling pengertian serta sudah masuk dalam narasi identitas masing-masing umat. Umat Islam tidak akan bisa melupakan duaratus tahun perang salib dan, di zaman modern, imperialisme kolonial kekuatan-kekuatan Eropa. Umat Kristen akan selalu mengasosiasikan Islam dengan "Tours dan Poitier" (pertempuran di dekat kota Paris tahun 738 M. di mana raja Prancis Karl Martel menghentikan ofensif tentara Arab) dan dengan 300 tahun keterancaman Eropa dari Turki.

Bukan hanya itu. Hubungan Kristen Islam di Indonesia sejak semula mengalami banyak gangguan. Masuknya agama Kristen di Indonesia mengejutkan umat Islam. Isu kristenisasi, pelbagai salah komunikasi, dan kecurigaan bahwa minoritas dengan licik memanipulasi kekuasaan untuk meminggirkan atau memojokkan umat Islam mengganggu persepsi umat Islam terhadap umat Kristen Indonesia.² Sebaliknya, sejak permulaan tahun 70-an umat Kristen di hampir seluruh wilayah Islami amat sulit membangun rumah ibadat, ada daerah-daerah di mana secara prinsip umat Kristen tidak akan dibiarkan beribadat. Sekurang-kurangnya lima program terhadap gedung-gedung umat Kristen³ meninggalkan trauma mendalam di umat Kristen. Begitu pula tingkat hasutan antara umat beragama, terutama dari pihak-pihak yang kesannya secara sistematis memanaskan kebencian sangat tinggi.⁴

Kita akan hidup terus dengan sejarah itu, tetapi kita seharusnya tidak terbelenggu olehnya. Justru dari pada panutan sekarang dituntut kemampuan untuk mengembangkan wawasan yang panjang dan baik, percaya bahwa sebenarnya umat-umat kita ingin, bahkan rindu, hidup baik-baik satu sa-

² Lih. juga: Alwi Shihab 1999, *Membendung Arus. Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan.

³ Surabaya, Situbondo, Tasikmalaya (1996), Rengasdengklok (1997), Ketapang (1998).

⁴ Tentang tahun 60-an lihat juga dalam Shihab 1999, 173 ss.

ma lain, bahwa tindak kekerasan dan konflik berdarah sering tidak lepas dari tangan apa yang disebut "provokator".

3. MEREBAKNYA KOMUNALISME

Akan tetapi, sesudah itu tadi dikatakan, menurut kami paling penting untuk disadari bahwa masalah-masalah yang kita alami di Indonesia sekarang tidak berkaitan dengan sejarah itu, bahkan tidak berkaitan dengan agama-agama, melainkan mempunyai dasar yang lain. Jadi kita jangan mencari jalan ke luar dari ketegangan-ketegangan yang ternyata masih ada di antara umat beragama di Indonesia, atas dasar pengandaian yang salah. Program-program yang sudah terjadi⁵ tidak dapat dijelaskan sedikit pun dengan memeriksa ajaran agama Kristen atau agama Islam atau wejangan para tokoh agama-agama itu. Ajaran-ajaran dan wejangan-wejangan itu dengan jelas melarang segala sikap agresif terhadap rumah ibadat agama lain. Hal yang sama berlaku pada penyerangan terhadap gereja-gereja individual yang bisa melibatkan masyarakat di tempat itu sendiri. Dengan memeriksa kekhasan agama yang masing-masing dianut oleh para perusuh kita tidak akan me-

⁵ Lihat. catatan nr. 4. Selain itu juga terjadi lebih banyak program di skala lebih kecil. Beberapa kali umat Islam menjadi kurban, begitu pernah di Maumere dan Dili.

nemukan jawaban apa pun atas pertanyaan: Apa sebab rumah ibadat menjadi objek kekerasan?

Sebaliknya, yang mencolok adalah kesamaan pola besar tindak kekerasan terhadap rumah ibadat dengan tindak kekerasan yang bersifat rusuh lainnya: Penyerangan terhadap gedung-gedung pemerintah dan polisi atau kontestan pemilu dalam kerusuhan kampanye pemilu, penjarahan terhadap toko, mall dengan nada rasial bulan Januari-Februari 1998 di Pantai Utara pulau Jawa dan bulan Mei di Medan, Jakarta, Solo, Palembang dan lain tempat - di mana juga terkesan adanya yang mengorganisasikannya amat kuat dan aparat sama saja enggan menindaknya (tak lain dari kasus Marsinah, Udin, dan lain-lain kejahatan di mana petunjuk tentang siapa yang sebenarnya terlibat sudah terang-terangan, tetapi karena ada beking tersebut, tidak jadi ada pengusutan yang sungguh-sungguh). Masyarakat juga rusuh sendiri, misalnya para fan klub sepak bola, penjarahan massal terhadap perkebunan, tanaman palawija milik orang kota, empang udang dsb. Begitu pula tawuran yang semakin menjadi antara kampung-kampung dan desa-desa yang bertetangga.

Selain peran besar pihak-pihak yang -demi kepentingan politik?- menghasut atau merekayasa kerusuhan massal itu, (dan, sekali lagi, di sini kita berhadapan dengan masalah bah-

wa tangan-tangan kegangsteran itu rupa-rupanya sampai ke kalangan penguasa [sipil dan/atau militer] sehingga aparat tidak dapat menindaknya) kita melihat sikap masyarakat yang mudah dihasut dan direkayasa dan mudah rusuh. Bangsa Indonesia tersebar atas ribuan pulau dan terdiri atas lapisan atas yang menikmati buah-buah pembangunan Orde Baru dan lapisan menengah ke bawah yang hanya mencicipinya, bahkan sering menjadi kurban pembangunan, lalu atas ratusan suku dan budaya yang menganut beberapa agama, lalu ada perbedaan antara penduduk asli dan pendatang, ada perbedaan ras, ada ketegangan antara Jawa dan pulau-pulau lain, ada dominasi budaya Jawa dalam politik di atas budaya-budaya lain dlsb. Kesannya sekarang titik-titik sambung keanekaan unsur bangsa ini mulai retak. Maka alasan sederhana pun, apalagi hasutan dan rekayasa yang canggih, mudah dapat menimbulkan konflik antara unsur-unsur itu. Apakah lalu suku, atau agama, atau ras, atau perasaan "orang kecil" yang "tidak ikut memiliki" hasil pembangunan, atau sentimen penduduk asli terhadap para pendatang atau sebaliknya yang menjadi warna sebuah ledakan adalah sangat sekunder dan tergantung dari konteks konkret.

Oleh karena itu salahlah kalau kita bicara tentang "masalah agama" dalam kaitan dengan konflik-konflik antara umat-

umat beragama itu. Seperti sudah disebutkan di atas, dalam kenyataan di kebanyakan kampung dan desa orang-orang dari suku, agama dan ras yang berbeda tetap hidup bersama dengan damai dan juga ingin hidup bersama dengan baik. Yang rawan adalah bahwa perdamaian itu mudah terganggu oleh alasan-alasan yang sepele, tetapi yang dalam salah satu arti bersifat "politis". Konflik-konflik itu tidak bersifat religius dan juga tidak ideologis (lain hal apakah ada perekayasa yang termotivasi ideologis), melainkan komunalistik. Dengan "komunalistik" di sini dimaksud suatu gejala sosio-psikologis, yaitu bahwa orang semakin tidak mampu menghayati diri sebagai "kita saudara sebangsa" atau "kita sama-sama manusia", melainkan mereka menghayati diri sebagai "kami" yang berhadapan dengan "mereka". "Mereka" itu adalah "yang lain", bisa yang dari suku lain, agama lain, ras lain, golongan sosial lain, asal usul lain. Penyempitan kemampuan untuk menghayati diri secara inklusif itu semakin menjadi-jadi. "Kami" menjadi semakin sempit, "mereka" semakin luas (ambil misalnya pelecehan mahasiswa yang unjuk rasa menentang Presiden Habibie sebagai "anti-Islam", padahal kebanyakan mereka adalah Islam juga). "Mereka" lalu menjadi outsider terhadapnya "kami" merasa acuh tak acuh, mudah curiga dan berprasangka, lalu barangkali takut, akhirnya mudah dihasut untuk menyerang simbol-simbol "mereka" itu.

4. MEMAHAMI MEREBAKNYA KOMUNALISME

Apa yang menjadi dasar merebaknya komunalisme yang kalau menjadi-jadi betul-betul mengancam kesatuan bangsa itu? Jelaslah bahwa ajaran dan teologi agama-agama tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Dasar gejala berbahaya itu tentu suatu disintegrasi sosial menyeluruh yang dialami bangsa kita. Kiranya adalah tiga lingkaran yang relevan untuk diperhatikan.

(1) Yang pertama adalah sebuah gejala kultural menyeluruh yang dialami oleh banyak bangsa di bumi kita sekarang. Masyarakat Indonesia sedang berada di tengah-tengah proses transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat pasca-tradisional. Bagi kelas-kelas menengah ke atas transformasi itu membuka cakrawala dan kesempatan yang baru untuk mengekspresikan diri dan oleh karena itu umumnya dihayati secara positif, bahkan antusias. Tetapi massa masyarakat terutama menghayati segi-segi negatif perubahan mendalam ini: Disorientasi karena nilai-nilai tradisional seakan-akan tidak terpakai lagi. Ancaman atas identitas, bahkan penghidupan mereka. Mobilitas baru dan perubahan dalam susunan hirarkis tradisional antar golongan dan kelompok yang mengancam juga. Dalam situasi ini primordialisme, dengan berbalik ke eksklusivitas kelompok semula, dengan sekaligus men-

curigai "mereka" yang "mengancam" di luar, merupakan salah satu opsi.

(2) Gejala itu menjadi rawan karena ketertutupan sistem kekuasaan selama Orde Baru. Ruang politik (political space) ditutup, masyarakat menjadi objek pengaturan dari atas. Apabila terjadi konflik antar masyarakat sendiri atau dengan pemerintah - yang melalui lurah terwakili sampai ke tengah-tengah desa - konflik itu tidak dipecahkan secara rasional, argumentatif dan diskursif, melainkan dengan tekanan dan ancaman. Di mana ancaman paling kotor yang dipakai, dan memang merupakan ancaman, adalah "kamu PKI!" dan "kamu ekstrem kanan!". Sering masyarakat merasa menjadi kurban pembangunan. Maka perasaan kecewa, sakit hati, dan perasaan diperlakukan dengan tidak adil terus terakumulasi dalam hati rakyat dan mudah menghasilkan perasaan curiga, iri dan dendam. Ketidakpercayaan sama sekali rakyat kepada aparat pemerintah, kecenderungan untuk memakai kekerasan untuk mencapai apa yang hak mereka, dan kesediaan untuk menjarah atau merusak apa yang termasuk "dunia sana", "dunia pembangunan" adalah buah kegagalan pengelolaan konflik selama Orde Baru.

(3) Sesudah Pak Harto berhenti dan diganti dengan pemerintah yang lemah, bersamaan dengan angkatan bersenjata

yang bingung dan tidak percaya diri, segala frustrasi dan kekecewaan rakyat ini dapat muncul ke permukaan. Tanda-tanda disintegrasi sosial dan keambrokan the rule of law yang kita saksikan sekarang adalah akibat sejarah puluhan tahun kekerasan struktural itu.

5. KE LUAR DARI KEMELUT

Begitu konflik-konflik antar agama dipahami sebagai gejala komunalisme, menjadi jelas bahwa jawaban-jawaban normatif atas dasar ajaran agama-agama, meskipun penting, namun tidak mencukupi. Ajaran yang mengajak umat-umat untuk bersikap positif dan menolak kekerasan merupakan usaha yang mendukung, akan tetapi usaha utama harus diarahkan pada sebab-sebab komunalisme itu. Sebab-sebab itu tidak teologis, melainkan sosio-psikologis.

Manakah langkah-langkah yang dapat diambil? Sebaiknya kita membedakan antara langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam jangka panjang kiranya dua struktur kehidupan masyarakat perlu direalisasikan: demokrasi dan keadilan sosial. Demokrasi adalah prasyarat normalisasi kembali keadaan dalam masyarakat (dan anggapan ini sekaligus menolak se-

bagai sangat keliru anggapan yang beberapa tahun lalu populer tidak hanya di kalangan atas Indonesia, melainkan juga di luar negeri, tentang "nilai-nilai Timur", d.l.l.k., bahwa di Asia Timur demokrasi merupakan sesuatu yang asing dan akan mengganggu pembangunan). *Pertama*, perlu "ruang politik" dibuka lagi supaya perhatian masyarakat meluas melepaskan konsentrasi pada nilai-nilai primordial komunitasnya sendiri. *Kedua*, masyarakat perlu belajar lagi bahwa konflik adalah sesuatu yang biasa dalam kehidupan sosial, baik konflik kepentingan maupun konflik emosional, dan bahwa - ya dalam rangka demokrasi - masyarakat menyediakan sarana-sarana diskusi publik dari lingkungan desa sampai ke lingkungan nasional untuk membicarakannya secara argumentatif dan mencapai kompromi-kompromi yang dapat disepakati. *Ketiga*, dengan partai-partai sebagai sarana ekspresi aspirasi masyarakat dalam pluralitasnya berakhirlah situasi negara otoriter, di mana masing-masing kelompok dan golongan mencari perhatian dari penguasa hal mana dengan sendirinya membuat mereka saling curiga dan mengiri. Keterbukaan demokratis merupakan syarat perlu untuk mengatasi masalah primordialisme dan komunalisme dalam masyarakat pasca tradisional yang pluralis.

Yang membuat hati rakyat pahit, curiga dan bahkan dendam adalah akumulasi perasaan bahwa ia diperlakukan dengan tidak adil. Pengalaman perlakuan tidak adil meracuni hati manusia. Oleh karena itu pembangunan yang akan kita laksanakan tidak pernah boleh menciptakan lagi kesenjangan seperti halnya pembangunan semasa Orde Baru. Dengan lain kata, pembangunan yang kita lakukan, harus dapat dirasakan sebagai adil oleh masyarakat.

6. TANGGUNGJAWAB PARA PANUTAN AGAMA

Namun, para agamawan tidak dapat menyerahkan seluruh tanggungjawab atas penyembuhan luka-luka masyarakat kepada negara. Para pimpinan, tokoh dan panutan agama secara aktif harus berusaha untuk mengembalikan hubungan baik antara para umat. Mereka dibebani tanggungjawab berat di hadapan Tuhan. Berikut hanya beberapa saran.

(1) Pertama, kita harus bersedia untuk menghentikan bahasa hasutan. Suka cepat emosi dan menghasut adalah tanda keadaan emosional yang tidak stabil, atau barangkali juga tidak dewasa. Justru karena itu diharapkan bahwa mereka yang menjadi panutan umat tidak membiarkan diri terbawa oleh emosi, lalu menghasut.

(2) Yang kedua, semua pihak harus tahan diri. Jangan langsung percaya setiap desas-desus, jangan terus langsung mau membalas padahal apa yang terjadi saja belum pasti. Hal itu terutama berlaku bagi para panutan masyarakat, baik formal maupun informal, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dan lokal. Bagaimana pun, para panutan agama harus sendiri menyadari bahwa mereka ditantang untuk membersihkan hati mereka sendiri dari emosi-emosi yang tidak baik, harus bersedia dengan jujur dan tanpa pamrih menyuarakan pesan agama-agama mereka yang merupakan pesan perdamaian, kebaikan, penolakan kekerasan dan balas dendam, pesan kesediaan untuk memaafkan.

(3) Ketiga, kita harus betul-betul menjalin komunikasi. Di semua tingkat kehidupan umat: dari atas sampai bawah dan dari bawah sampai atas. Kita harus berani bicara satu sama lain, terutama dialog kehidupan, analisis dan refleksi etis kontekstual dan dialog aksi merupakan bentuk-bentuk dialog yang sebenarnya mudah terbuka. Alangkah baiknya kalau para pimpinan umum, justru di tingkat lokal, saling mengenal, misalnya saling bersilaturahmi, agar dapat menjadi biasa dan bahkan akrab dalam hubungan nyata.⁶

⁶ Dalam kaitan ini kami hanya dapat menghimbau agar fatma MUI di masa Orde Baru yang melarang umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen diberi

(4) Kalau hubungan antara umat kita lebih baik, akibat fatal SKB tiga Menteri dapat diatasi yang mengatur pembangunan rumah ibadat sedemikian rupa hingga masing-masing mayoritas dapat memakainya untuk mencegah pembangunan rumah ibadat minoritas, padahal rumah ibadat itu sudah sangat diperlukan. Sekarang SKB ini mempersulit usaha untuk mengajak umat-umat yang menjadi minoritas berpandangan positif terhadap umat beragama yang masing-masing menjadi mayoritas.

penjelasan yang lebih memadai. Fatwa ini di luar umat Islam tidak dapat dimengerti. Sulit dipahami bahwa ada agama yang melarang para penganutnya mengucapkan selamat kepada saudara tetangga beragama lain pada saat mereka mempunyai perayaan. Di beberapa tempat fatwa MUI ini menghasilkan perubahan dramatik dalam hubungan antara umat Islam dan Kristen setempat. Puluhan tahun lamanya saudara-saudara Muslim tidak hanya suka menyalami umat Kristen pada hari raya besarnya, melainkan juga mengirim makanan dan lain tanda ketetanggaan. Dan sebaliknya pada hari raya seperti Idul Fitri. Sekarang kebiasaan itu lama kelamaan mati. Mengucapkan selamat tidak berarti membenarkan iman kepercayaan orang yang diselamati, melainkan semata-mata merupakan tanda kebaikan hati dan perhatian. Orang Kristen yang mengucapkan "selamat hari raya Idul Fitri" tidak menjadi orang Islam, dan orang Islam yang mengucapkan "selamat Natal" kepada umat Kristen pada hari raya kegembiraan mereka tentang kelahiran Yesus - padahal Yesus juga nabi bagi umat Islam, apakah umat Islam tidak boleh gembira atas kelahirannya? - tidak menjadi orang Kristen. Kalau fatwa yang begitu luas pengaruh negatifnya bagi persaudaraan antara warga umat-umat beragama dalam kehidupan sehari-hari itu diperjelas, tentu efek negatifnya itu dapat dipahami sebagai salah paham. Kiranya yang dimaksud adalah "jangan ikut menyatakan suatu keyakinan iman yang bertentangan dengan agama Islam!" Tetapi mengucapkan selamat saja, ikut gembira karena tetangga beragama lain bergembira, kiranya merupakan rentangan kemanusiaan universal dan biasa dan sulit dimengerti bahwa gerakan sosial "alami" itu bisa bertentangan dengan suatu agama.

Inilah beberapa contoh praktis kemungkinan untuk secara nyata memperbaiki hubungan antar umat langsung di basis. Pemerintah memang juga cukup berpengaruh. Kalau pemerintah tidak secara meyakinkan memperhatikan dan merangkul semua golongan, niscaya akan muncul kecurigaan dan kecemburuan baru. Ketidakmampuan atau ketidakmauan aparat untuk melindungi gedung-gedung terhadap serangan massa yang rusuh merupakan unsur yang langsung meningkatkan potensialitas rusuh itu. Adalah sangat perlu agar pemerintah secara meyakinkan mengambil langkah-langkah ke arah reformasi kehidupan politik, lebih-lebih ke penegakan kehidupan demokratis melalui pemilihan umum demokratis. Dengan demikian pelbagai kecurigaan dalam masyarakat akan berkurang yang selalu cenderung untuk memperkuat ketegangan-ketegangan horisontal dalam masyarakat.

PENUTUP

Meskipun betul bahwa konflik antar agama di negara kita tidak pertama-tama boleh dikembalikan pada unsur-unsur religius, namun jelas juga bahwa para panutan dan tokoh mereka wajib berat di hadapan Tuhan untuk tidak memberikan ruang kepada kebencian dan rasa-rasa gelap lain dalam hati mereka.

Bagi orang Kristen mestinya jalannya harus jelas. Yesus menuntut kebaikan hati terhadap lawan dan penganiaya, tanpa kompromis. Umat Kristen di Indonesia hanya mempunyai fungsi positif apabila mereka memberikan kesaksian tentang Roh Yesus Kristus, dan Roh itu Roh cintakasih, kebaikan dan penolakan kebencian. Umat Kristen harus berani percaya bahwa cinta lebih kuat daripada kebencian, pengampunan lebih kuat daripada balas dendam, dan kerendahan hati yang mengaku bahwa kita sendiri tidak luput dari dosa dan kejahatan lebih baik daripada kesombongan. Mereka juga boleh yakin bahwa sikap-sikap itu sepenuhnya didukung oleh saudara-saudari dari umat beragama lain. Dengan sikap injili itu mereka dapat menyumbang sesuatu yang berharga, dan sekaligus tidak eksklusif, terhadap persatuan bangsa Indonesia. ■